

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Demi lancarnya implementasi penelitian ini, sangat penting untuk memahami masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengertian terhadap subjek penelitian merupakan unsur pemahaman, oleh karena itu penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang variabel-variabel dan elemen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan dicirikan sebagai keadaan serba kekurangan, baik dari segi uang, pengetahuan, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan bekerja dan berusaha (Azriyansyah, 2022). Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi mana yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga akan terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Mahendra, 2016).

Pengertian atau batasan tentang kemiskinan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijelaskan. Konsep kemiskinan sebagai fenomena sosial sangat berbeda dengan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi. Kemiskinan ekonomi merupakan fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan orang-orang miskin dan biasanya

dikaitkan dengan masalah hasil pendapatan, sedangkan kemiskinan budaya lebih banyak terdapat pada diri seseorang, seperti gaya hidup, falsafah hidup, tingkah laku, nilai-nilai tradisional, persepsi, dan sikap. Setiap orang memiliki karakteristik yang unik berdasarkan pemahamannya terhadap kehidupan yang sedang dikaji (Santosa, 2005).

Kita dapat dengan mudah mengenali tanda-tanda kemiskinan di lingkungan kita seperti kurang gizi, busung lapar, buta huruf, lingkungan hidup yang kotor, tingginya angka kematian, dan rendahnya harapan hidup. Namun, untuk mengoperasionalkan konsep kemiskinan ini, masih diperlukan beberapa uji kuantitatif untuk lebih memahami masalah yang sedang dihadapi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan secara umum kemiskinan itu sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pengertian yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau sekelompok orang, termasuk laki-laki dan perempuan, untuk memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari

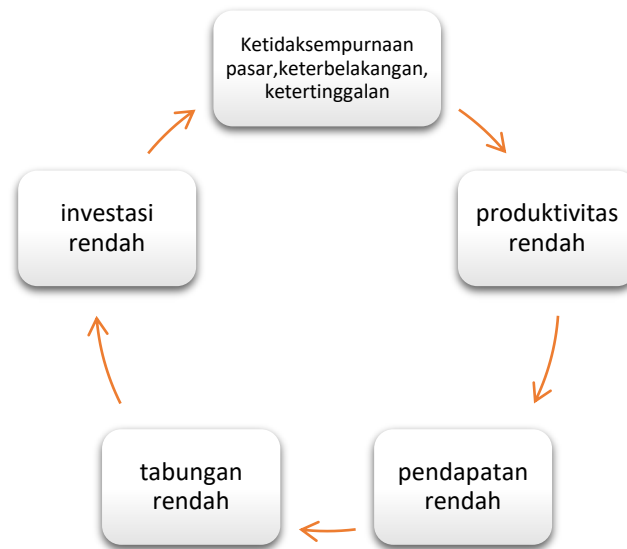
perlakukan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Apriyanti, 2011).

Menurut T.R Malthus kemiskinan yaitu suatu proses pembangunan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses naik dan turunnya aktivitas ekonomi dan bersangkutan dengan perkembangan kesejahteraan. Perkembangan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari besarnya pendapatan seseorang. Penerapan teori Malthus pada pembangunan ekonomi mengenai kemiskinan dan keterbelakangan negara terbelakang yaitu analisis mengenai sebab kemiskinan negara terbelakang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan petani yang disebabkan kekurangan lahan subur, namun petani tidak memiliki modal untuk memperbaiki lahan mereka (Yustie, 2017).

Malthus berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sumber daya, terutama pangan. Dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa populasi tumbuh secara eksponensial (deret ukur), sementara produksi pangan meningkat secara aritmetika (deret hitung). Ketidakseimbangan ini menyebabkan kelebihan populasi yang tidak dapat terdukung oleh ketersediaan pangan, sehingga memicu kemiskinan. Malthus percaya bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pertumbuhan penduduk akan jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan.

Menurut Kuncoro (2000) penyebab kemiskinan secara makro yaitu muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah (Apriyanti, 2011). Kemiskinan adalah kondisi ketika seorang individu tidak dapat mempertahankan skala hidupnya yang cukup tinggi untuk dapat memberikan efisiensi fisik serta mental, agar memungkinkan dirinya dan keluarganya dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat yang baik. Karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang dilakukan dengan tidak bijaksana. Kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kabupaten, tetapi masyarakat perkotaan juga merasakannya. Mengembangkan empati terhadap orang miskin serta keluarga yang berkecukupan, terutama dalam pengambilan keputusan publik (Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022).

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Semakin rendah produktivitas maka semakin rendah pendapatan yang mereka terima. Pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, dan rendahnya investasi menyebabkan keterbelakangan. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse dan dikutip oleh Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).



Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Faktor penyebab kemiskinan berdasarkan teori Lingkaran Setan Kemiskinan yaitu, pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia (Lindrianti, 2024). Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse berpendapat bahwa inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak

memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.

Selain itu, kemiskinan memiliki dampak negatif yang luas, termasuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Masyarakat miskin cenderung memiliki daya beli rendah yang berdampak pada efek multiplier ekonomi, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah pendapatan yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta keterbatasan akses terhadap modal.

2.1.1.1 Penyebab Kemiskinan

Banyak faktor penyebab terjadinya kemiskinan seperti rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, buruknya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan masih belum memadainya fasilitas pendidikan. Penyebab kemiskinan lainnya antara lain pendidikan yang tidak memadai, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya modal dan beban keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah berarti seseorang hanya mempunyai sedikit keterampilan khusus yang diperlukan dalam kehidupan. Keterbatasan tersebut mempersulit seseorang untuk menghadapi dunia kerja atau dunia bisnis.

Menurut *Sharp et al.* (2000), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu Negara, biasanya yang sering menjadi acuan tolak ukur adalah dari pendidikan (buta huruf). Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi.

2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal

Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.

3. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi

Pada jaman era globalisasi seperti sekarang menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak seseorang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran. Dari hal ini awal mula kemiskinan terjadi. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan

4. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien

Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadang masih jarang memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. Sebagai contoh masyarakat di desa untuk me-masak lebih cenderung menggunakan kayu bakar dari pada menggunakan gas yang lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan.

5. Tingginya pertumbuhan penduduk

Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan untuk bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan minimnya bahanpangan yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya kemiskinan.

Menurut Paul Spicker (2002) penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat :

1. *Individual Expalantion*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial Explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidak beruntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural Explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. *Structural Explanation*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidak seimbangan dengan perbedaan status atau hak.

Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2005) dalam (Adawiyah, 2020) yaitu:

- a.) Faktor Individual, yang berkaitan dengan aspek patologis, seperti kondisi fisik dan psikologis yang mirip satu sama lain. Kemiskinan disebabkan oleh

tindakan, keputusan, atau kemampuan orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan

- b.) Faktor Sosial, yaitu kondisi sosial yang mempengaruhi seseorang seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, atau karakteristik lain dari seseorang menjadi kerabat. Di antara faktor-faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi kelompok individu yang miskin yang biasanya mengakibatkan kemiskinan antar generasi.
- c.) Faktor budaya, kondisional, atau kualitas hidup yang menyebabkan kemiskinan. Secara khusus, faktor ini sering menyebabkan kemiskinan kultural atau hari kemiskinan yang menghubungkan hari kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menunjukkan bahwa masyarakat dengan subkultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sikap-sikap “negatif”, seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa bisnis, dan cenderung sulit diatur di tempat kerja, sering terlihat pada kerabat.
- d.) Faktor struktural, yang terkait dengan sistem atau struktur yang tidak terdefinisi dengan baik, sensitif, atau atau tidak dapat diakses dengan baik, yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, Sistem ekonomi berbasis neoliberalisme di Indonesia yang mengakibatkan petani dan nelayan menjadi miskin, Selain itu, pajak dan iklim investasi yang tidak berpihak kepada mereka yang berada di sektor informal. Sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia telah mendorong

para pemodal dalam negeri dan pemodal asing untuk terus meningkatkan kekayaannya.

2.1.1.2 Pengukuran Kemiskinan

Perkiraan garis kemiskinan merupakan cerminan dari konsep kemiskinan tertentu. Garis kemiskinan ini merupakan langkah penting dalam menurunkan ambang batas kemiskinan. Pengambilan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah kemiskinan juga akan mengidentifikasi garis kemiskinan tambahan yang akan digunakan dalam menentukan ambang batas kemiskinan. Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah ukuran yang paling sering digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Angka 10% berarti dalam populasi 100 orang, terdapat 10 orang yang rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Adapun rumus untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin adalah sebagai berikut:

$$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$$

Dimana:

Z = Garis Kemiskinan

Y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik garis kemiskinan dihitung dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Untuk menghitung garis kemiskinan makanan (GKM), BPS mengumpulkan informasi pola pengeluaran populasi rujukan untuk komoditas makanan, yang ditetapkan pada 1998 sebagai komoditas dasar. Komoditas dasar tersebut di antaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, hingga rokok.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

1) Rumus Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

$$GKM = \sum_{k=1}^n (P_k \times Q_k)$$

Dimana:

P_k = Harga komoditas k di wilayah tersebut.

Q_k = Jumlah rata-rata komoditas k yang dikonsumsi oleh populasi referensi.

n = Jumlah komoditas pangan yang dipertimbangkan (biasanya 52 komoditas).

2) Rumus Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

$$GKNM = \sum_{i=1}^n (V_i \times R_i)$$

Dimana:

V_i = Nilai pengeluaran per komoditas/sub-kelompok non-makanan.

R_i = Rasio pengeluaran komoditas/sub-kelompok non-makanan menurut wilayah (berdasarkan data dari survei konsumsi).

Dalam (Santosa, 2005) ada dua pendekatan yang menjadi dasar untuk menurunkan ambang batas kemiskinan. Pertama, menghitung jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah orang ini disebut sebagai ukuran jumlah kepala. Ukuran ini menyoroti jumlah individu atau kelompok yang pendapatannya masih berada di bawah tingkat kebutuhan minimum. Seperti halnya ukuran mutlak, ukuran ini juga biasanya dinyatakan secara relatif. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin lebih besar dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Pendekatan yang kedua yaitu mengurangi jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini dikenal sebagai *poverty gap*, atau kesenjangan kemiskinan. Dalam hal ini, ada beberapa bentuk kesenjangan kemiskinan, seperti persentase Produk Domestik Bruto yang seharusnya digunakan untuk mendata penduduk miskin, atau rasio kesenjangan kemiskinan berdasarkan jumlah golongan penduduk miskin, dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyesuaian ambang batas kemiskinan melalui konsep waktu akan dibahas dengan menggunakan konsep kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*). Perkiraan kesenjangan kemiskinan, yang bervariasi menurut jumlah penduduk, sangat sensitif terhadap perubahan tingkat golongan penduduk miskin. Kesenjangan kemiskinan adalah dimensi yang menunjukkan perbedaan antara tingkat penduduk miskin dan garis kemiskinan. Perubahan ini akan terus terjadi meskipun terjadi perubahan tingkat pendapatan, meskipun tidak mengubah posisi penduduk yang bersangkutan.

Menurut Todaro (2008) kemiskinan dapat dibedakan menurut menurut sifatnya yang terdiri atas:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum agar seseorang dapat hidup layak. Tetapi juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat pendapatan minimum ini merupakan pembatas untuk menyebutkan keadaan yang miskin atau biasa disebut juga garis kemiskinan. Seseorang termasuk dalam kategori miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Hal itu terjadi sebab ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diantaranya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Berbagai studi ilmiah yang serius tentang definisi kemiskinan sudah dilakukan sejak awal abad ke-20. Studi itu melahirkan definisi tentang kemiskinan absolut. Definisi absolut kemiskinan terkait dengan studi ilmiah pertama yang dilakukan oleh Rowntree dan rekan-rekannya pada awal abad ke-20. Definisi ini didasarkan pada gagasan 'subsisten atau minimal', yang dipahami sebagai kebutuhan minimum untuk mempertahankan hidup. Menurut Rowntree gagasan tentang kemiskinan absolut menuntut kita untuk memahami apa yang dibutuhkan orang untuk bertahan hidup dan kemudian memastikan bahwa orang miskin menerima ini, dan tidak lebih (Adon et al., 2023).

2. Kemiskinan Relatif

Berdasarkan kategori ini, kumpulan orang dapat dikatakan miskin apabila mereka berada pada tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Walaupun kemiskinan merupakan istilah yang umum, ditandai dengan tidak mempunyai seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang dianggap layak, namun kemiskinan itu memiliki ciri yang berbeda antar wilayah. Perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan setempat (Dama et al., 2016).

Menurut Townsend definisi relatif kemiskinan tidak hanya fokus pada pencapaian standar minimal komoditas, tetapi juga pada akses yang baik dalam kehidupan politik dan ekonomi yang baik. Berdasarkan klaim ini, Townsend merumuskan teori tentang kemiskinan relatif yang didefinisikan sebagai individu, keluarga dan kelompok dalam populasi dapat dikatakan miskin ketika mereka tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh jenis makanan, berpartisipasi dalam kegiatan dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang biasa di masyarakat tempat mereka berasal (Adon et al., 2023).

Di samping itu Nasution (1996) berpendapat bahwa kemiskinan dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Kemiskinan Struktural

Kategori ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki kondisi hidupnya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Kemiskinan struktural dapat terjadi secara diam-diam atau tidak sama sekali karena sistem organisasi yang tidak hanya mengawasi organisasi tetapi juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kemiskinan organisasional menciptakan situasi di mana sebagian anggota masyarakat umum tidak memiliki kapasitas untuk menilai indikator ekonomi dan berbagai fasilitas ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia.

2. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi sebagai akibat dari menurunnya kualitas manusia dan air, penggunaan teknologi yang kurang tepat, dan dampak bencana alam. Dalam situasi di mana manusia dan hewan hidup berdampingan memiliki kualitas yang rendah atau buruk, proses produksi menjadi Hal ini menyebabkan penurunan efisiensi produksi.

2.1.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja merupakan indikator penting dalam analisis ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Secara umum, tingkat kesempatan kerja menggambarkan sejauh mana angkatan kerja dapat terserap dalam kegiatan

ekonomi produktif. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, semakin kecil pula jumlah pengangguran, sehingga hal ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Teori Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya pasar tenaga kerja dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas akan mendorong peningkatan pembagian tenaga kerja sehingga permintaan tenaga kerja bisa bertambah. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Adam Smith, tenaga kerja yang terserap dalam proses produksi akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa (Suatan et al., 2023).

Keynes melalui karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* menegaskan bahwa tingkat kesempatan kerja ditentukan oleh besarnya permintaan agregat. Ketika permintaan agregat menurun, perusahaan tidak akan menyerap tenaga kerja secara maksimal, sehingga menimbulkan pengangguran dan meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal maupun moneter akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Keynes juga mengingatkan bahwa permintaan agregat yang lemah menyebabkan produksi terhambat sehingga kesempatan kerja penuh yang diidamkan tidak tercapai. Oleh sebab itu, untuk menurunkan kemiskinan harus ada upaya meningkatkan permintaan agregat agar kesempatan kerja bertambah dan pengangguran berkurang (Edna Safitri et al., 2022).

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan PDB, akan tetapi ditandai dengan penciptaan kesempatan kerja yang produktif. Menurut Todaro dan Smith kualitas pekerjaan sama pentingnya dengan kuantitas, jika kesempatan hanya tersedia di sektor informal dengan upah rendah, maka kemiskinan tidak serta merta berkurang. Todaro juga menjelaskan bahwa peningkatan kesempatan kerja diperkotaan dapat mendorong migrasi dari pedesaan, meskipun peluang kerja nyata di kota masih terbatas. Hal ini justru dapat menciptakan pengangguran urban dan menambah masalah kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas dan distribusi kesempatan kerja sangat menentukan sejauh mana pengurangan kemiskinan dapat tercapai.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) kesempatan kerja dalam hal ini adalah pasar kerja yang dilihat dari banyaknya lapangan kerja yang tercipta baik menurut sektor dan potensinya maupun berdasarkan wilayah tertentu yang dapat terisi oleh pencari kerja atau dapat tercermin dari orang yang bekerja. Ledakan penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara lapangan kerja untuk menampung mereka tidak memadai. Kesempatan kerja bukan saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga memberikan isi kepada asas kemanusiaan (Lamas, 2022).

2.1.3 Jumlah Angkatan Kerja

Teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nations* menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Smith, tenaga kerja merupakan faktor utama dalam proses produksi. Semakin banyak angkatan kerja yang terserap

dalam kegiatan ekonomi, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Peningkatan output ini pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, menurut pandangan Adam Smith, pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal akan membawa efek positif bagi pengurangan kemiskinan.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh David Ricardo (1817) melalui *Principles of Political Economy and Taxation*. Ricardo berpendapat bahwa penambahan jumlah tenaga kerja tidak selalu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam teorinya mengenai “upah besi” (*iron law of wages*), Ricardo menjelaskan bahwa ketika jumlah tenaga kerja meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai, maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Kondisi ini akan menekan tingkat upah pekerja ke batas minimum yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Akibatnya, rumah tangga pekerja tetap berada dalam kondisi miskin meskipun mereka bekerja.

Menurut Keynes, jumlah angkatan kerja yang besar akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan apabila tersedia permintaan efektif yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja. Apabila permintaan agregat rendah, maka perekonomian tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia. Akibatnya, sebagian penduduk usia kerja akan menganggur atau bekerja pada sektor informal dengan produktivitas rendah.

Menurut Lewis, negara berkembang umumnya memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat besar di sektor tradisional dengan produktivitas rendah. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang bekerja dengan pendapatan minim, sehingga sebagian besar rumah tangga berada pada garis kemiskinan. Namun, surplus tenaga kerja di sektor tradisional dapat menjadi modal pembangunan apabila dapat dialihkan ke sektor modern yang lebih produktif. Apabila sektor modern mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan upah yang lebih tinggi, maka proses alih tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran terselubung, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika sektor modern tidak berkembang secara signifikan, maka kelebihan jumlah angkatan kerja hanya akan menimbulkan pengangguran terbuka maupun setengah menganggur di perkotaan, yang justru memperburuk kemiskinan.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif (*United Nation Development Programme*). Sedangkan indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (Sari & Setyowati, 2022).

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya “*Global Human Development Report*” memperkenalkan konsep

“Pembangunan Manusia (*Human Development*)” sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging people's choices*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. UNDP mengembangkan IPM sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui tiga dimensi yaitu; kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan per kapita). Tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah sering kali memiliki hubungan yang erat dengan hasil IPM karena masyarakat miskin umumnya memiliki akses yang lebih rendah terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (1995) dalam (Winarti, 2014), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.

- 4) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk memantau kemajuan dan hasil kerja proyek-proyek konstruksi di suatu wilayah. Dalam hal ini, IPM muncul sebagai gambaran hasil dari program konstruksi yang telah selesai yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak (Susanti, 2013).

Sebagaimana di kemukakan oleh PBB Indeks Pembangunan Manusia (IPM) muncul sebagai jawaban atas kekurangan penggunaan pendapatan per kapita sebagai proksi pembangunan. Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan pengertian kapabilitas manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1984). Menurut Sen, pembangunan harus dilihat sebagai proses yang meningkatkan kemampuan individu, bukan hanya meningkatkan pendapatan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi, lingkungan kerja yang sehat, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Tambunan et al., 2022).

Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Thomas Malthus berfokus pada hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya, khususnya pangan. Malthus terkenal dengan pandangannya yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan selalu melebihi pertumbuhan sumber daya, yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Malthus menyatakan bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, maka akan terjadi "positive checks" berupa kematian akibat kelaparan, penyakit, dan bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengendalian populasi, kemiskinan akan meningkat karena sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah.

Menurut Hukum Okun (*Okun's Law*) bahwa melalui peningkatan produktivitas akibat peningkatan IPM akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan peluang dan permintaan tenaga kerja yang dapat menyerap masyarakat dan membantu mengurangi angka pengangguran, karna jika angka pengangguran naik maka tingkat kemiskinan juga akan semakin tinggi (Palindangan & Bakar, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) dalam (Primandari, 2020), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup identik dengan aspek kesehatan yang merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kemampuan penduduk untuk mencapai suatu tingkat yang mengindikasikan tingkat kesehatan yang lebih baik. Angka

harapan hidup juga sangat dipengaruhi oleh beberapa kematian bayi dan balita yang cukup rentan dalam kehidupannya, serta kematian ibu saat melahirkan. Kematian tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat, yang disebabkan oleh gizi kurang dan stress lingkungan. Selain disebabkan oleh gizi kurang, angka kematian bayi dan balita juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang meliputi pasokan udara yang kuat, fasilitas udara yang besar, dan tinja yang berasal dari sumber-sumber udara.

2) Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikannya, merealisasikan program wajib belajar sembilan tahun, disamping meningkatkan program bagi mereka yang belum memiliki ijazah dengan mengikuti program kejar paket dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah cabang pendidikan yang berhubungan dengan pemerintah dan bidang terkait untuk meningkatkan kualitas pengetahuan siswa baik melalui pendidikan formal maupun informal di sekolah-sekolah, seperti dengan melaksanakan program-program seperti Kejar Paket atau menambah jumlah sekolah yang ada di daerah yang sulit dijangkau.

3) Daya Beli

Tingkat daya beli masyarakat dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah tertentu, dalam menilai perekonomian suatu daerah dapat digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), oleh karena itu jika PDRB suatu daerah tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya PDRB maka perekonomian daerah tersebut juga akan

meningkat. PDRB mencerminkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berasal dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari berbagai sektor.

Menurut badan pusat statistik IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakes hasil Pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berdasarkan kajian tentang capaian indeks pembangunan manusia menurut UNDP, IPM dikelompokkan kedalam beberapa kategori diantaranya :

1. $IPM < 60 =$ IPM rendah
2. $60 < IPM < 70 =$ IPM sedang
3. $70 < IPM < 80 =$ IPM tinggi
4. $IPM < 80 =$ IPM sangat tinggi

Indeks Pembangunan Manusia ini menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu negara atau daerah, sehingga semakin tinggi nilai IPM maka akan menunjukkan pencapaian pembangunan manusia yang semakin baik, begitu juga sebaliknya. Berikut merupakan rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan manusia, dan indikatornya:

$$IPM = \sqrt[3]{kesehatan \times pendidikan \times pengeluaran} \times 100$$

$$\text{Indikator Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$\text{Indikator Pendidikan} = \frac{HLS + RLS}{2}$$

$$HLS = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$RLS = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$\text{Indikator Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto perkapita

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sadono Sukirno, 2015). Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Menurut Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan warga suatu bangsa untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada warganya. Adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan (*institutional*) serta kepercayaan. Sedangkan Sadono Sukirno (2004) menjelaskan bahwa dalam analisis ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi memiliki dua pengertian yang berbeda. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan suatu perekonomian yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi

dan mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara atau wilayah secara praktis (Wiguna, 2013).

Menurut ekonomi Klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektoral dalam menggunakan faktor-faktor yang berhubungan dengan produksi. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi seperti pengajaran, pembelajaran, dan manajemen yang lebih efektif. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan produksi (Sunusi et al., 2014). Teori Adam Smith telah memberikan kontribusi yang besar dalam menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor penghambatnya. Namun demikian, ada beberapa kritik terhadap teori Adam Smith yaitu; pembagian kelas dalam masyarakat, Alasan menabung, asumsi persaingan sempurna, pengabaian terhadap peranan entrepreneur dan asumsi stasioner.

Suatu aspek ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini lebih tinggi daripada yang terlihat di masa lalu. Arsyad mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

- 1) Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (human resources).
- 2) Pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kemajuan teknologi.
- 4) Sumber daya institusi (sistem kelembagaan).

PDRB merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu proses membandingkan produksi nasional pada waktu tertentu dengan periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu teori pertumbuhan klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19-an yang di kembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith terdapat dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan produksi total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga, yaitu:

- 1) Jumlah sumber daya alam yang tersedia (atau faktor yang mempengaruhi produksi tanah)
- 2) Jumlah hari kerja insani (atau jumlah penduduk)
- 3) Persediaan barang modal yang tersedia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit produksi baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah

dari barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang di produksi oleh semua unit usaha di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan PDRB yang menggambarkan besaran maupn distribusi pendapatan antara berbagai kelompok atau golongan di masyarakat (Aghitsni & Busyra, 2022).

Menurut Mankiw (2016) Produk Domestik Bruto adalah total pendapatan yang diperoleh di dalam negeri (domestik), termasuk pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang dimiliki entitas asing dan total pengeluaran barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dalam menghitung seberapa baik kinerja perekonomian di suatu wilayah.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga yang berlaku. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun dasar. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Faktor Faktor Yang

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2019-2023. Pada penelitian ini penulis menggunakan referensi rujukan jurnal ataupun artikel ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Khairani Alawiyah Matondang, Nazwa Fazirah Nasution, Zakia Hasanah Hasibuan, Arnol Prabowo Siagian (2024) Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-ISSN: 3025-7786 P-ISSN: 3025-7794 Vol. 2 No. 2 September 2024
2.	Ida Syafa'atur Rohmah1, Jalu Aji Prakoso (2022) Pengaruh IPM, RLS, TPT, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiakinan Di Provinsi Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia,	Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, TPT	Indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	TRANSEKON OMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Volume 2 ISSUE 6 (2022)
3.	Lisa Agustin, Hadi Sumarsono (2022)	Indeks Pembangunan Manusia	Bantuan Sosial, pengangguran	Pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan	Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri

	Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur			bantuan social berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Volume 7 No. 2 Tahun 2022
4.	Sudirman Sakinah (2020) Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Indeks Pembangunan Manusia, dan Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi	Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk, IPM dan angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Manajemen dan Sains
5.	Nurhayati, Rizki Maulana, Paradiva, Ginting, Asnidar, Ahmad Rida (2025) Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia		Jumlah angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume.3, Nomor .1 Tahun 2025
6.	Musyarofah Nilal Muna (2025) Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Minimum dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah	Tingkat kesempatan kerja	Pendidikan, Upah Minimum	Pendidikan, upah minimum, dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.2, No. 2, Tahun 02025
7.	Fahmi Apriansyah, Muhammad Abdi,Runggu Sihombing, Natalia, Sam Deva Nasra (2025) Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terhadap Kemiskinan	Angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia	Pengangguran	Angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan, IPM berpengaruh positif dan signifikan, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.	JRPP Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Volume.8, Nomor 2, Tahun 2025

	di Sumatera Utara Periode 2001-2021				
8.	Fani Cantika, Emi Maemunah (2022) Analisis Pengaruh PDRB perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung	PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka	PDRB perkapita dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Cakrawala Repositori IMWI Volume 05. Nomor 02. Desember 2022
9.	Anjela N Wongkar, Tri Oldy Rotinsulu, Mauna Th. B Maramis (2023) Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Pemetintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow	Indeks Pembangunan Manusia,	Belanja Modal, Pengangguran Terbuka	IPM dan belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Tingkat pengangguran Terbuka positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 3 Bulan Maret 2023
10.	Rahma Wardana Putri, Junaidi, Candra Mustika (2019) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan penduduk	Pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 8. No.2, Mei – Agustus 2019 ISSN: 2303-1220
11.	Febri Br Hutabarat, Eliza Handayani Lubis, Joko Suharianto (2025) Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Inflasi Terhadap	Indeks Pembangunan Manusia	Inflasi, TPT	TPT berpengaruh positif signifikan, IPM berpengaruh negatif signifikan, sedangkan Inflasi berpengaruh positif tidak	JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA http://jicnusantara.com/index.php/jiic Vol : 2No: 3, Maret2025 ISSN : 3047-7824

	Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2001-2023)			signifikan terhadap kemiskinan.	
.12.	Tiffany Ardina (2024) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	IPM	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan, sedangkan IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	e-ISSN2745-6366 Vol. 06, No.1, Januari 2024
13.	Bryan Denis Lowing, Debby Rotinsulu, HanlySiwu (2021) Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa	PDRB	Tingkat Pengangguran, dan Jumlah penduduk	PDRB berpengaruh signifikan sedangkan Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No.7 Desember2021
14	Stevan Chrisbert, Tri Oldy, Amran T. Naukoko (2023) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	PDRB perkapita	Pertumbuhan ekonomi, belanja bantuan sosial	Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.	JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP) E-ISSN 3021-8063 JSEP: Vol 1. No 1. 2023
15.	Arfa Valiant Kevin, Ardito Bhinadi, Akhmad Syari'udin (2022) Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, dan Rata-Rata Lama Sekolah	PDRB	Angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah	PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan angka harapan hidup dan rata-rata lama	SIBATIK JOURNAL Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021	sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	VOLUME NO.12 (2022)	1
---	---	------------------------	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia, dengan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di kab/kota provinsi Gorontalo. Dari kerangka pemikiran tersebut, selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memudahkan kegiatan penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

2.3.1 Hubungan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan

Peluang kerja yang tinggi menunjukkan besarnya peluang bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan individu dan keluarganya. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, output perekonomian suatu wilayah juga meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tingkat makro, rendahnya kesempatan kerja menyebabkan sebagian angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan dan pendapatan, sehingga memperparah kondisi kemiskinan. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan kerja mengakibatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang berakhir pada ketiadaan pendapatan bagi sebagian pekerja (Mesrizal, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul, (2019) memiliki hasil bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tidak semua kesempatan kerja mampu memberikan dampak negatif bagi kemiskinan. Dengan kata lain, kesempatan kerja yang banyak hanya akan efektif menurunkan kemiskinan apabila disertai dengan kualitas kerja yang layak, produktif, dan memberikan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup.

Tingkat kesempatan kerja merupakan cerminan dari sejauh mana pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi pada dasarnya menunjukkan adanya peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui aktivitas kerja, sehingga secara teoritis diharapkan mampu menekan angka kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan

Jumlah angkatan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, karena mencerminkan potensi tenaga produktif yang dapat berperan dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar jumlah angkatan kerja, semakin besar pula potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja tidak serta-merta berbanding lurus dengan menurunnya kemiskinan, karena harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Hubungan antara jumlah angkatan kerja dengan kemiskinan pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kapasitas perekonomian

daerah dalam menyerap tenaga kerja. Apabila jumlah angkatan kerja yang besar diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, serta sektor ekonomi yang berkembang, maka kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan akan nyata. Sebaliknya, apabila angkatan kerja didominasi oleh tenaga kerja dengan keterampilan rendah serta lapangan kerja yang terbatas, maka jumlah angkatan kerja yang tinggi justru berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman & Sakinah, 2020) memiliki hasil bahwa angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Semakin banyak penduduk yang bekerja, semakin besar pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan. Namun, jika pemerapan tenaga kerja tidak memadai, peningkatan angkatan kerja dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan. Apabila pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja, maka hal tersebut dapat menimbulkan pengangguran maupun setengah pengangguran. Kondisi ini berpotensi memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat karena sebagian angkatan kerja tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Rendahnya tingkat pembangunan manusia, yang diukur dengan IPM, akan menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas kerja di antara penduduk. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu negara secara langsung terkait dengan rendahnya produktivitas, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan yang rendah dan

dengan demikian lebih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Darma Endrawati, dkk (2023) memiliki hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi capaian IPM akan diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan. Mengacu pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), bahwa usaha memutus lingkaran kemiskinan dilakukan pada sebagian atau seluruh siklusnya. Di antara siklus tersebut adalah produktivitas dan pendapatan. Kualitas penduduk yang sehat, mengenyam pendidikan yang cukup dan kebijakan ekonomi yang pro penduduk miskin akan membuka peluang kesempatan untuk meningkatkan produktivitas guna memperoleh pendapatan yang layak.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ida & Jalu, (2022), memiliki hasil bahwa IPM memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan kuantitas sumber daya manusia akan berdampak pada kualitas sumber daya tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak pada produktivitas sumber daya tersebut, yang diukur dengan indeks pembangunan manusia, yang terbukti memiliki signifikan terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah tertentu.

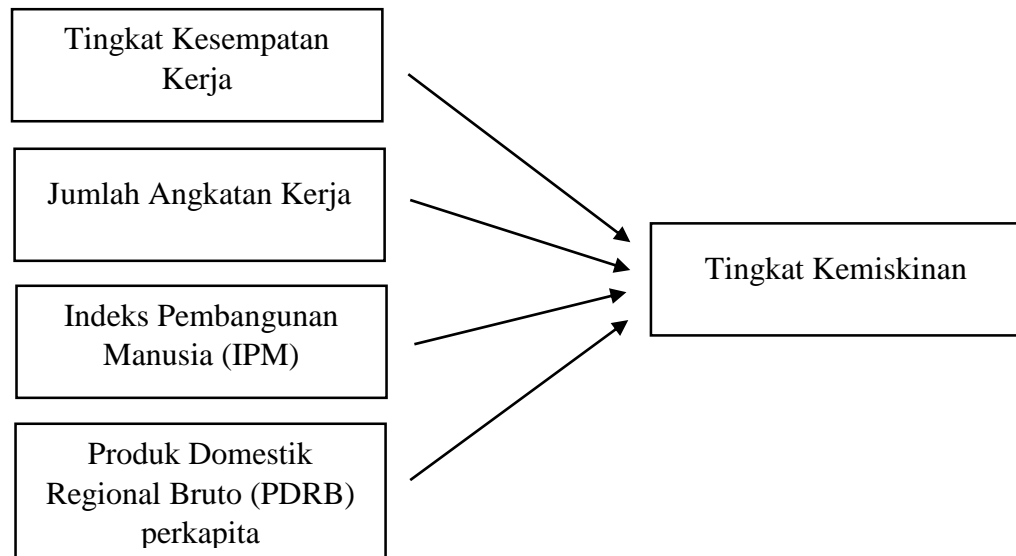
2.3.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto perkapita Terhadap

Kemiskinan

Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perkiraan tingkat pertumbuhan rata-rata berdasarkan pertumbuhan semua sektor. Pada saat yang sama, Produk domestik regional bruto (PDRB) digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya mata rantai ekonomi dan peran sektor ekonomi. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin besar pula kekuatan *open source* wilayah tersebut. Pada dasarnya, Produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi seluruh angkatan kerja dengan memperkirakan bahwa ketika nilai Produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrian Putri, dkk (2019) memperlihatkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kepuasan kerja akan berdampak pada ketimpangan dalam tindak lanjut pembagian pendapatan tersebut, sehingga menghasilkan suatu kondisi pembangunan ekonomi tertentu dengan peningkatan kemiskinan.

Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa peningkatan PDRB biasanya berhubungan dengan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan yang berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian yang menunjukan bahwa ada hubungan negatif antara PDRB dan kemiskinan, dimana setiap peningkatan PDRB dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini adalah :

1. Diduga secara parsial tingkat kesempatan kerja, jumlah angkatan kerja, IPM, dan PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo.
2. Diduga secara bersama-sama tingkat kesempatan kerja, jumlah angkatan kerja, IPM dan PDRB perkapita berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo.